



**PERATURAN DESA
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA
TAHUN 2015**



**DESA PANGGUNG HARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2015**



**RANCANGAN PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL**

NOMOR 6 TAHUN 2015

Tentang

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA PANGGUNGHARJO,**

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu perencanaan pembangunan yang optimal;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, RKPDesa merupakan rencana kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran RPJMDesa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Panggungharjo tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5687);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa (Lembar Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 48);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2009 Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 49);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 23);

13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2015 Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34);
14. Peraturan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2013 s/d Tahun 2017

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGGUNGHARJO

dan

LURAH DESA PANGGUNGHARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN
SEWON KABUPATEN BANTUL TENTANG RENCANA
KERJA PEMBANGUNAN DESA TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2015 yang selanjutnya disebut RKPDesa Tahun 2015 dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas kerja Pemerintahan Desa Panggungharjo Tahun Anggaran 2015 seperti terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 2

RKPDesa Tahun 2015 berisi rencana program/kegiatan pembangunan desa pada tahun 2015 yang pada hakekatnya merupakan penjabaran tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2013-2017.

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di
Panggunharjo
Pada tanggal Juni 2015

LURAH DESA PANGGUNGHARJO,

WAHYUDI ANGGORO HADI

Diundangkan di Desa Panggunharjo
CARIK DESA PANGGUNGHARJO,

YULI TRISNIATI

LEMBARAN DESA PANGGUNGHARJO TAHUN 2015 NOMOR.....

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA DESA PANGGUNG HARJO TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN

A. Program dan kegiatan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada tahun 2014 sudah terlaksana dengan baik, tapi ada sebagian kegiatan yang belum dapat dilaksanakan, antara lain :

1. Pengisian Lowongan Jabatan Kabag. Pemerintahan
2. Pelantikan Kabag, Pemetintahan
3. Penyusunan SOTK
4. Inventarisasi Aset Desa dan Pengelolaan Sumber Pendapatan
5. Pengelolaan Makam
6. Workshop, Seminar, Sarasehan dan Pameran Pendidikan
7. Workshop, Seminar, dan Sarasehan Bidang Pembedayaan Ekonomi dan One Village One Creatif Cultural Product (OVOC2P)
8. Pelatihan Ketrampilan usaha
9. Fasilitasi Korban Rentenir
10. Bantuan Modal bagi Gakin
11. Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Keahlian Non Formal
12. Workshop, Seminar, Sarasehan Bidang Pertanian Lahan Sempit
13. Workshop, Seminar, Sarasehan Kebencanaan dan Kegawatdaruratan
14. Studi Kelayakan Pendirian Rumah Sewa Sehat Sederhana
15. Fasilitasi Pameran Produk TTG
16. Bantuan Hibah Peralatan TTG

B. Keadaan umum Pemerintahan Desa Panggunharjo

1. Batas Wilayah

- | | | |
|-----|-----------------|--------------------------------------|
| 1.1 | Sebelah Utara | : Kota Yogyakarta |
| 1.2 | Sebelah Timur | : Desa Bangunharjo |
| 1.3 | Sebelah Selatan | : Desa Timbulharjo |
| 1.4 | Sebelah Barat | : Desa Tirtonirmolo dan Pendowoharjo |

2. Jumlah Penduduk	:	27.691 Jiwa
2.1 Penduduk Laki-laki	:	14.191 Jiwa
2.2 Penduduk Perempuan	:	13.500 Jiwa
3. Jumlah Kepala Keluarga	:	8.827 KK
3.1 Kepala Keluarga Laki-laki	:	5.944 KK
3.2 Kepala Keluarga Perempuan	:	2.883 KK
4. Jumlah Kepala Keluarga Miskin	:	1.445 KK
5. Luas Wilayah Desa Panggunharjo	:	560.9660 Ha
6. Berdasarkan Penggunaan		
5.1 Industri	:	11.8500 Ha
5.2 Pertokoan / Perdagangan	:	9.2500 Ha
5.3 Perkantoran	:	1.5650 Ha
5.4 Pasar Desa	:	-
5.5 Tanah Wakaf	:	5.7905 Ha
5.6 Tanah Sawah	:	282.2180 Ha
5.6.1. Irigasi teknis	:	-
5.6.2. Irigasi setengah teknis	:	282.2180 Ha
5.7 Tanah Kering (pekarangan)	:	250.2925 Ha
7. Berdasarkan Peruntukan		
6.1 Jalan	:	24.0331 Ha
6.2 Sawah dan ladang	:	282.2180 Ha
6.3 Bangunan umum	:	-
6.4 Pemukiman / perumahan	:	240.6540 Ha
6.6 Pekuburan	:	7.9200 Ha
6.7 Lain - lain (Sungai & parit)	:	6.1409 Ha
8. Jumlah Pedukuhan	:	14 Pedukuhan
9. Jumlah Rukun Tetangga (RT)	:	118 RT

Sumber data dari Monografi Desa Panggunharjo Tahun 2014 Semester 2.

C. Tujuan dan sasaran yang dicapai :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan APBDes.
2. Segala sesuatu yang tertuang dalam APBDes benar-benar dapat dipertanggung jawabkan sehingga penggunaan Keuangan Desa sesuai dengan kegiatan yang diprogramkan.
3. Kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa diharapkan dapat terealisasi dengan baik.
4. Memberi arah tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa berikutnya.
5. Mengurangi kemungkinan terjadinya pemborosan Keuangan Desa, karena penggunaan yang tidak tepat.

BAB II

VISI DAN MISI

A. VISI

Visi Lurah Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul adalah menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab untuk mewujudkan masyarakat Desa Panggungharjo yang demokratis, mandiri, dan sejahtera serta berkesadaran lingkungan.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Pemerintah Desa Panggungharjo berkeinginan mewujudkan kehidupan mandiri dan berkejahteraan dalam kehidupan yang demokratis dengan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab.

Makna dari masing-masing kata yang terdapat dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

- ❖ **Bersih** dalam arti pemerintahan yang tulus ikhlas dan suci.
- ❖ **Transparan** dalam arti setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.
- ❖ **Bertanggungjawab** dalam arti pemerintahan yang wajib menanggung segala sesuatunya dan menerima pembebanan sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain. Kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan.
- ❖ **Demokratis** dalam arti bahwa adanya kebebasan berpendapat, berbeda pendapat dan menerima pendapat orang lain. Akan tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus dilaksanakan bersama-sama dengan penuh rasa tanggungjawab.
- ❖ **Mandiri** dalam arti bahwa kondisi atau keadaan masyarakat Panggungharjo yang berdiri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain.
- ❖ **Sejahtera** dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Desa Panggungharjo telah terpenuhi secara lahir dan batin. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman, juga

terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

❖ **Berkesadaran lingkungan** dalam menjadikan kelestarian lingkungan sebagai ruh atas segala kegiatan pembangunan.

B. Misi

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional pemerintah desa yang diwujudkan dalam kegiatan ataupun pelayanan dan merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.

Pernyataan visi merupakan cerminan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai gambaran kedepan yang diinginkan.

Misi Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pelayanan yang profesional melalui peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang responsif, akuntabel dan transparan.
- b. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang dinamis dan damai.
- c. Meningkatkan potensi dan daya dukung lingkungan untuk menciptakan peluang usaha
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan hijau yang partisipasif.
- e. Meningkatkan dan memperluas jaringan kerjasama Pemerintah dan Non Pemerintah.

BAB III
PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

Pada tahun 2015 pembangunan Desa Panggungharjo diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Prioritas pembangunan Desa Panggungharjo Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Empatik dan bertanggungjawab
 - a. Penguatan Tata Kelembagaan Pemerintah Desa
 - 1) Penyesuaian SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja).
 - 2) Penyusunan Dokumen Anjab, ABK, Tapkin
 - 3) Penyusunan SOP
 - b. Peningkatan Kesejahteraan Lurah dan Perangkat Desa
 - c. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
 - 1) Peningkatan Prasarana Pemerintahan
 - 2) Pengadaan Sarana Kantor
 - d. Peningkatan Kapasitas Lurah dan Perangkat Desa
 - e. Penguatan Kelembagaan BPD, LKD, dan Lembaga Desa Lainnya.
 - 1) Operasional BPD
 - 2) Pemberian Tunjangan BPD
 - 3) Operasional RT
 - 4) Peningkatan Sarana Administrasi RT/Pedukuhan
 - f. Penguatan Kelembagaan Linmas Desa
 - 1) Pembinaan Linmas
 - 2) Fasilitasi Pelatihan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan
 - 3) Pengadaan Seragam dan Atribut Linmas
 - 4) Pengadaan Sarana Komunikasi Satlinmas
 - 5) Pengadaan Lampu Parkir
 - g. Inventarisasi dan Pengelolaan Aset Desa
 - 1) Inventarisasi Aset dan Kekayaan Desa
 - 2) Perlindungan dan Pemanfaatan Aset dan Kekayaan Desa
 - 3) Digitalisasi Data Tanah Desa
 - h. Peningkatan Wawasan Kebangsaan
 - i. Penyusunan dan Pengundangan Produk Hukum Desa

j. Pelembagaan Partisipasi Masyarakat

- 1) Pelembagaan Bapel JPS
- 2) Pelembagaan Pusat Studi Desa
- 3) Pelembagaan Desa Budaya
- 4) Pendirian Lembaga Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM

2. Pengentasan Kemiskinan

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melakukan kategorisasi keluarga miskin didasarkan atas kriteria yang meliputi beberapa aspek yaitu :

a. Aspek Penentu

- 1) Seluruh anggota keluarga tidak mampu makan minimal dua kali dalam sehari (Rp 1.500,- untuk satu kali makan perjiwa).
- 2) Sebagian besar dari anggota keluarga tidak memiliki pakaian pantas pakai minimal 6 stel.
- 3) Tempat tinggal atau rumah berlantai tanah atau berdinding bambu/beratap rumbia.

b. Aspek Penyebab

Jumlah penghasilan yang diterima seluruh anggota keluarga yang berusia 16 tahun keatas (termasuk kepala keluarga) rata-rata per bulan Rp 800.000,-.

c. Aspek Pendukung

- 1) Bila ada anggota keluarga yang sakit tidak mampu berobat ke fasilitas kesehatan dasar.
- 2) Keluarga tidak mampu menyekolahkan anak yang berumur 7 tahun s/d 15 tahun.
- 3) Jumlah kekayaan milik keluarga (diluar tanah dan bangunan) Rp 2.500.000,00.
- 4) Tanah dan bangunan yang ditempati bukan milik sendiri.
- 5) Tidak menggunakan air bersih untuk keperluan makan minum dan MCK.
- 6) Tidak menggunakan listrik untuk kebutuhan rumah tangga.
- 7) Jumlah anggota atau jiwa dalam KK (termasuk kepala keluarga) lima jiwa atau lebih.

Adapun kegiatan untuk Pengentasan Kemiskinan & Penanganan Desa

Tertinggal meliputi :

- a. Pengembangan Basis Data Kemiskinan Berbasis Komunitas
 - b. Pengentasan dan Penanggulangan Kemiskinan bagi :
 - 1) Non Wabin (Warga Binaan) P2WKSS
 - 2) Wabin (Warga Binaan) P2WKSS
 - c. Penguatan Kelembagaan Bapel JPS
 - d. Peningkatan Kualitas RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
3. Pendidikan dan Agama
- a. Penguatan Kelembagaan PAUD dan Lembaga Pendidikan Non Formal
Lainnya
 - 1) Penguatan Kelembagaan TK
 - 2) Peningkatan Kesejahteraan Guru TK Non GTT
 - 3) Penguatan Kelembagaan PAUD dan BKB
 - 4) Peningkatan Kapasitas Kader PAUD
 - 5) Penguatan Kelembagaan TPA/TPQ
 - 6) Peningkatan Kapasitas Asatidz TPA
 - 7) Penguatan Kelembagaan PKBM dan Perpustakaan Mandiri
 - b. Pengembangan Pra Sarana PAUD dan Pendidikan Non Formal
Lainnya
 - c. Pembinaan Kehidupan Beragama
 - 1) Peningkatan Kehidupan Beragama
 - 2) Penguatan Fungsi Kelembagaan Takmir Masjid
 - 3) Pembinaan Kaum Rois
 - 4) Pengembangan Pra Sarana Peribadatan
 - d. Pembinaan Keluarga Sakinah
 - e. Fasilitasi Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan
 - f. Pembinaan Kepemudaan
 - g. Pendampingan Keluarga dengan Anak Putus Sekolah
4. Kesehatan
- a. Perlindungan Kesehatan Ibu dan Anak dan Kelompok Rentan
Lainnya
 - 1) Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi
 - 2) Pendampingan Keluarga dengan Anak Gizi Buruk
 - 3) Pendampingan Keluarga dengan Anak Difable

- 4) Pendampingan Lansia Terlantar
- 5) Penguatan Kelembagaan Kelompok Lansia Produktif

b. Penguatan Kelembagaan Posyandu

- 1) Penguatan Kelembagaan Posyandu Balita
- 2) Perluasan fungsi Sosial Dasar Posyandu Balita
- 3) Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Balita
- 4) Monitoring Posyandu Balita
- 5) Penguatan Kelembagaan Posyandu Lansia
- 6) Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Lansia

c. Penguatan Kapasitas Kader Kesehatan, Kader KB – KS dan KP Ibu

- 1) Peningkatan Kapasitas Kader Sehat (PHBS)
- 2) Peningkatan Kapasitas

d. Peningkatan prasarana Posyandu balita/lansia

5. Budaya dan Pariwisata

- a. Penetapan Desa Budaya
- b. Penguatan Kelembagaan Kampung Wisata
- c. Fasilitasi Event Seni Budaya dan Wisata
- d. Penguatan Lembaga Seni dan Budaya Pedukuhan

6. Pertanian Dalam Arti Luas

- a. Penguatan Program Pemerintah Supra Desa Bidang pertanian
 - 1) Penguatan Program Pemerintah Supra Desa dalam Bidang Pertanian
 - 2) Penguatan Kapasitas Kelembagaan Gapoktan
 - 3) Penguatan Kapasitas Kelembagaan PUAP
 - 4) Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pokdakan
 - 5) Penguatan Kelembagaan KWT (Kelompok Wanita Tani)
 - 6) Optimalisasi Lahan Pekarangan

7. Perdagangan dan Pasar Tradisional

- a. Pendampingan IKM dan Koperasi
- b. Sinkronisasi Kelembagaan Pengelola LKM Tingkat Desa
- c. Penguatan kelembagaan BUMDes
- d. Penataan Kawasan Lapangan Patmasuri

- e. Fasilitasi Pameran Perdagangan

- 8. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
 - a. Revitalisasi Kelembagaan Penanganan Kebencanaan dan Kegawatdaruratan (TAGANA)
 - b. Penguatan Kapasitas Usaha Ekonomi Produktif Berbasis Lingkungan
 - c. Pembuatan Sarana Penunjang Mitigasi Bencana
 - d. Pengadaan Bibit Tanaman Konservasi
 - e. Pengadaan Saprass Penanganan dan Pengelolaan Sampah dan Limbah

- 9. Infrastruktur, penataan ruang dan pemukiman
 - a. Pengelolaan Lapangan dan Makam Desa
 - b. Perencanaan Pengembangan Kawasan Tertinggal
 - c. Penyusunan Studi Kelayakan Pendirian Rumah Sewa Sehat Sederhana
 - d. Rehabilitasi dan Perawatan Infrastruktur Desa
 - e. Bantuan Hibah Infrastruktur

- 10. Pengembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tepat Guna)
 - a. Inventarisasi Pelaku dan Pengembang Teknologi Tepat Guna
 - b. Bantuan Hibah Peralatan TTG (Teknologi Tepat Guna)

BAB IV

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA

Pelaksanaan pembangunan Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dalam tahun 2015 meliputi kegiatan fisik dan non fisik yang dikelompokkan dalam 4 (empat) bidang dan tambah satu belanja tidak terduga, antara lain yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Belanja Tidak Terduga

Keempat bidang dan Satu kegiatan tersebut dibagi dalam beberapa kegiatan sebagai berikut :

A. Rencana Kegiatan Rutin Yang Akan Dilaksanakan

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
 - 1.1 Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah Desa dan Pamong Desa.
 - 1.2 Operasional Perkantoran
 - 1.3 Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - 1.4 Operasional Rukun Tetangga (RT)
 - 1.5 Penyusunan Rancangan Peraturan Desa
 - 1.6 Penyusunan LPPD (Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa), LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 1.7 Penyusunan Profil Desa
 - 1.8 Pengelolaan Arsip Desa
 - 1.9 Pengelolaan Perpustakaan Desa
 - 1.10 Penegasan dan Penetapan Batas Desa
 - 1.11 Pengelolaan Informasi Desa dan Administrasi Desa
 - 1.12 Inventarisasi Aset dan Kekayaan Desa
 - 1.13 Sosialisasi Produk Hukum Desa
 - 1.14 Penyusunan Studi Kelayakan Pendirian Rumah Sewa Sehat Sederhana
 - 1.15 Pengelolaan Tanah Kas Desa

- 1.16 Penyusunan SOP Pelaksanaan Pembangunan Desa, pengelolaan Keuangan Desa
 - 1.17 Pengiriman Peserta Upacara HUT RI
 - 1.18 Pengiriman Peserta Upacara Hari Jadi Kabupaten Bantul
 - 1.19 Penyusunan Monografi Desa
 - 1.20 Penyusunan Dokumen ANJAB, ABK, dan TAPKIN
 - 1.21 Pemberian Ijin Penggunaan Fasilitas Desa
 - 1.22 Intensifikasi Pajak dan Retribusi
 - 1.23 Inventarisasi Pelaku dan Pengembang TTG
 - 1.24 Fasilitasi Pelaksanaan Pilkada
 - 1.25 Pengadaan Barang dan Jasa Desa
 - 1.26 Pelantikan Pamong Desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- 2.1 Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor dan Gedung Milik Desa
 - 2.2 Pembangunan dan Pemeliharaan Ruang Dukuh
 - 2.3 Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier
 - 2.4 Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Kebudayaan Desa
 - 2.5 Pengelolaan TK Milik Desa
 - 2.6 Pemberian Layanan Posyandu Balita dan Lansia
 - 2.7 Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Ibadah
 - 2.8 Pemeliharaan Pohon Jati Milik Desa dan Pohon Perindang
 - 2.9 Pendirian Lembaga Pengelola Makam dan Lapangan Desa
 - 2.10 Perencanaan Penataan dan Pemeliharaan Lapangan Desa
 - 2.11 Pemetaan Data dan Potensi Kawasan yang terindikasi Tertinggal
 - 2.12 Pembangunan dan Pengelolaan BUMDes
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 3.1 Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
 - 3.2 Pembinaan Kaum Rois dan Pemuka Agama di Desa
 - 3.3 Penanggulangan Penyakit Masyarakat
 - 3.4 Pembinaan Linmas Desa
 - 3.5 Fasilitasi Kegiatan PKK
 - 3.6 Fasilitasi Kegiatan LPMD
 - 3.7 Fasilitasi Kegiatan Karangtaruna dan LKD Lainnya

- 3.8 Fasilitasi Bapel JPS
 - 3.9 Fasilitasi Lembaga Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM
 - 3.10 Fasilitasi TKPK Desa & Pedukuhan
 - 3.11 Pendataan Data Kemiskinan Berbasis Komunitas
 - 3.12 Pemberian Santunan Sosial kepada Keluarga Fakir Miskin dan Anak Yatim Piatu
 - 3.13 Pemberian Santunan Sosial kepada Keluarga dengan Anak Gizi Buruk
 - 3.14 Pemberian Santunan Sosial kepada Keluarga dengan Anak Putus Sekolah
 - 3.15 Pemberian Santunan Sosial kepada Keluarga dengan Anak Diffabel
 - 3.16 Pemberian Santunan Sosial kepada Ibu Hamil Beresiko Tinggi
 - 3.17 Pemberian Santunan Sosial kepada Lansia Terlantar
 - 3.18 Pembentukan Forum Anak Desa
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 4.1 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 - 4.2 Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - 4.3 Pembentukan Pengelola Desa Budaya
 - 4.4 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
 - 4.5 Peningkatan Kapasitas Pokglat LPMD
 - 4.6 Pengembangan Seni Budaya Lokal
 - 4.7 Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
 - 4.8 Fasilitasi Kader Sehat Desa
 - 4.9 Fasilitasi Kegiatan DBKS
 - 4.10 Fasilitasi Kesiapan Siswa Menghadapi UAN
 - 4.11 Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan (P2WKSS)
 - 4.12 Pembentukan Pokdakan Desa
 - 4.13 Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani dan Perikanan
 - 4.14 Fasilitasi Refresing Kelembagaan Tani
 - 4.15 Peningkatan Fasilitas Pertanian
 - 4.16 Fasilitasi Akses Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan
 - 4.17 Sosialisasi / Pendataan oleh Pekerja Sosial Masyarakat
 - 4.18 Perlombaan P2WKSS Tingkat Kabupaten
 - 4.19 Perlombaan UP2K Tingkat Kabupaten

- 4.20 Fasilitasi Tim Pendamping Program CDMK
- 4.21 Pelatihan Bendahara Desa
- 4.22 Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa
- 4.23 Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa
- 4.24 Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Desa
- 4.25 Pelatihan Pelayanan Publik
- 4.26 Penyesuaian dan Pelatihan Organisasi Pemerintahan Desa
- 4.27 Pelatihan Pengelolaan Pembangunan Desa
- 4.28 Pelatihan Dasar Komputer
- 4.29 Fasilitasi Pelatihan Bela Negara dan Wawaasan Kebangsaan
- 4.30 Pembentukan dan Pelatihan Kader Mitra Keluarga Sakinah dan DBKS
- 4.31 Pelatihan Kearsipan bagi Pamong Desa
- 4.32 Pelatihan Perkoperasian dan Kewirausahaan
- 4.33 Fasilitasi Pengurusan Ijin IKM dan Konsolidasi Aset LKM
- 4.34 Pelatihan Bina Keluarga Balita
- 4.35 Pelatihan Kader Posyandu
- 4.36 Peningkatan Kapasitas Kader KP-Ibu
- 4.37 Peningkatan Kapasitas Pemuda Putus Sekolah
- 4.38 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
- 4.39 Peningkatan Fasilitas Peribadatan Masyarakat
- 4.40 Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat
- 4.41 Pembentukan dan Pembinaan Forum Anak Desa
- 4.42 Peningkatan Fasilitas Tempat Belajar Masyarkat
- 4.43 Peningkatan Fasilitas Pembelajaran Al-Qur'an Masyarakat
- 4.44 Peningkatan Kehidupan Beragama
- 4.45 Pembentukan dan Pembinaan Forum Silaturahmi Takmir Masjid
- 4.46 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Kelompok Lansia Produktif
- 4.47 Pelatihan Keterpaduan Paud-Posyandu-Kp Ibu
- 4.48 Perlombaan Antar Posyandu
- 4.49 Pengajian Syawalan
- 4.50 Pengajian Bersama Masyarakat Setiap Selasa Kliwon
- 4.51 Lepas Sambut Jamaah Haji
- 4.52 Peningkatan Fasilitas Tempat Bank Sampah (Glugo)
- 4.53 Peningkatan Fasilitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
- 4.54 Peningkatan Fasilitas Pembelajaran Taman Kanak-Kanak

- 4.55 Peningkatan Fasilitas Pembelajaran Paud
- 4.56 Peningkatan Fasilitas Jalan Pedukuhan
- 4.57 Peningkatan Fasilitas Saluran Air Hujan Pedukuhan
- 4.58 Peningkatan Fasilitas Penerangan Jalan Umum dan Rambu Jalan Pedukuhan
- 4.59 Peningkatan Fasilitas Prasarana Pedukuhan
- 4.60 Peningkatan Fasilitas Peningkatan Fasilitas Infrastruktur Pedukuhan Sampel
- 4.61 Doa Bersama Hari Jadi Desa Panggungharjo
- 4.62 Kirab Budaya Hari Jadi Desa Panggungharjo
- 4.63 Pentas Seni
- 4.64 Fasilitasi Penyaluran Dana PSKS

5. Belanja Tidak Terduga

5.1 Kejadian Luar Biasa

Pelaksanaan program pembangunan dalam tahun 2015 dilaksanakan berdasarkan 11 (sebelas) skala prioritas sebagai berikut :

1. Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Empatik dan Bertanggungjawab.
2. Pengentasan Kemiskinan
3. Pendidikan dan Agama
4. Kesehatan
5. Budaya dan Pariwisata
6. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
7. Pertanian dalam Arti Luas
8. Perdagangan dan Pasar Tradisional
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10. Infrastruktur, Penataan Ruang dan Pemukiman
11. Pengembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi)

Pola pembangunan di Desa Panggungharjo pada Tahun Anggaran 2015 berpedoman pada dasar pembangunan Kabupaten Bantul dan RPJMDes yang mengupayakan terwujudnya etos kerja :
 Progotamansari, Sejahtera, Demokratis dan Agamis.

DRAFT SKALA PRIORITAS PEMERINTAH DESA TAHUN 2015

PRIORITAS PROGRAM : 1. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG EMPATIK DAN BERTANGGUNG JAWAB

PROGRAM KERJA : 1. PENGUATAN TATA KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA

NO	DAFTAR KEGIATAN INDIKATIF	USULAN			TIM PENGELOLA KEGIATAN	REKOMENDASI
		BENTUK KEGIATAN	CAKUPAN KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN		
1	Penguatan Tata Kelembagaan Pemerintah Desa	1 Penyesuaian SOTK dan Pelatihan 2 Penyusunan Dokumen Anjab, ABK, Tapkin 3 Penyusunan SOP a Pelaksanaan Pembangunan Desa b Pengelolaan Keuangan Desa c Pengelolaan SDM	Melakukan penyesuaian SOTK selaras dengan PP 43/2014 Menyusun dokumen analisa jabatan, analisis beban kerja dan dokumen penetapan kinerja Menyusun dokumen pedoman pelaksanaan pembangunan desa yg setidaknya terdiri dari mekanisme pengajuan bantuan, kelenturan pencairan bantuan, penggunaan anggaran, pelaporan dan ketentuan pertanggungjawaban Menyusun dokumen pedoman pengelolaan keuangan desa yg setidaknya terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan keuangan Desa. Prosedur penerimaan, prosedur pengeluaran keuangan dan prosedur pelaporan Menyusun dokumen tentang pedoman pengelolaan SDM yang setidaknya memuat tentang analisa kebutuhan peningkatan kapasitas SDM seperti jadwal dan materi pelatihan	Peraturan Desa (Perdes) tentang SOTK dan Peraturan Lurah Desa (Perlurdes) tentang Pokok pokok kepegawaian, Keplurdes tentang perubahan atas SK pengangkatan perangkat desa Keputusan Lurah Desa (Keplurdes) tentang Anjab, ABK dan penetapan kinerja Perlurdes tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa Keplurdes tentang Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial, Dokumen NPHDesa, Keplurdes tentang pengangkatan TPK untuk tiap kegiatan Perdes tentang Pengelolaan Keuangan Desa Perlurdes tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa, Keplurdes tentang SOP Pengelolaan Keuangan Desa, Keplurdes tentang pengangkatan bendaharawan desa, Keplurdes tentang PTPKD, Keplurdes Tim Pelaksana DD dan ADD Keplurdes tentang Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Carik dan Pejabat Struktural Desa Carik dan Pejabat Struktural Desa Carik dan Pejabat Struktural Desa Carik dan Pejabat Struktural Desa	

NO	DAFTAR KEGIATAN INDIKATIF	USULAN			TIM PENGELOLA KEGIATAN	REKOMENDASI
		BENTUK KEGIATAN	CAKUPAN KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN		
		d Pengelolaan Aset dan Kekayaan Desa	Menyusun dokumen tentang pengelolaan aset dan kekayaan desa yg setidaknya memuat informasi tentang Daftar Aset dan Kekayaan Desa, Rumusan tentang SOP pengelolaan aset dan kekayaan desa	Perdes tentang Pengelolaan Aset dan Kekayaan Desa Perlurdes tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Desa Keplurdes tentang pengangkatan bendaharawan barang	Carik dan Pejabat Struktural Desa	
		e Pengadaan Barang dan Jasa Desa	Menyusun dokumen tentang Pedoman pengadaan barang dan jasa	Perdes tentang pengadaan barang dan jasa, Perlurdes tentang pedoman pengadaan barang dan jasa desa, Keplurdes tentang pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	Carik dan Pejabat Struktural Desa	
		f Pengelolaan Informasi Desa dan Administrasi Desa	Menyusun dokumen tentang pengelolaan informasi desa yg setidaknya memuat tentang ketentuan tentang prosedur pelayanan informasi publik, ketentuan tentang pengaduan dan tanggapan atas pengaduan masyarakat	Perdes tentang Pengelolaan Informasi Desa, Perlurdes tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Desa, Keplurdes tentang pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi Desa, Keplurdes tentang SOP Pelayanan Informasi Desa	Carik dan Pejabat Struktural Desa	
		g Pengelolaan Arsip Desa	Menyusun dokumen tentang pengelolaan arsip desa setidaknya memuat tentang ketentuan tentang kegiatan pengarsipan, ketentuan pelayanan kearsipan desa, ketentuan tentang pengamanan dan pengelolaan arsip desa	Perlurdes tentang Pengelolaan Arsip Desa, Keplurdes tentang pedoman pengelolaan arsip desa, Keplurdes tentang Pengangkatan Pejabat Arsiparis Desa	Carik dan Pejabat Struktural Desa	
		h Pelayanan Publik	Menyusun dokumen tentang pedoman pelayanan publik yang setidaknya memuat tentang prosedur pelayanan publik	Perlurdes tentang Pelayanan Publik, Keplurdes tentang SOP Pelayanan Administrasi Desa		
	4 Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Administrasi Desa		Menyusun daftar kebutuhan barang dan jasa serta melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan SID	Daftar kebutuhan barang dan jasa, terlaksananya pengadaan barang dan jasa	Carik dan Pejabat Struktural Desa	

NO	USULAN			TIM PENGELOLA KEGIATAN	REKOMENDASI
	DAFTAR KEGIATAN INDIKATIF	BENTUK KEGIATAN	CAKUPAN KEGIATAN		
PRIORITAS PROGRAM : 1. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG EMPATIK DAN BERTANGGUNG JAWAB PROGRAM KERJA : 2. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN LURAH DAN PERANGKAT DESA					
2	Peningkatan Kesejahteraan Lurah dan Perangkat Desa	1. Pembaharuan sistem remunerasi 2. Pemberian Tunjangan	Melakukan kajian dan menyusun dokumen sistem remunerasi berbasis kinerja	Perfudes tentang Sistem Penggajian Perangkat Desa	Carik dan Pejabat Struktural Desa
PRIORITAS PROGRAM : 1. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG EMPATIK DAN BERTANGGUNG JAWAB PROGRAM KERJA : 3. PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN DESA					
3	a Peningkatan Prasarana Pemerintahan	1 Renovasi Lanjutan Kantor Pelayanan Terpadu 2 Renovasi Kamar Mandi Musholla 3 Renovasi Ruang Dukung	Renovasi teras depan menjadi kunciungan, penambahan interior dan mebelair. Renovasi kamar mandi Musholla agar ramah anak, ramah lansia dan ramah difable Ruang dukuh agar ada ruang kerja dan rapat	Perfudes tentang Sistem Penggajian Perangkat Desa	Carik dan Pejabat Struktural Desa
	b Pngadaan Sarana Kantor	1 Belanja Modal 2 Belanja Barang Habis Pakai	Pengadaan jaringan, mesin foto kopi, mesin absensi pamong, papan pengumuman Pengadaan ATK dan barang habis pakai lainnya		

NO	DAFTAR KEGIATAN INDIKATIF	USULAN			TIM PENGELOLA KEGIATAN	REKOMENDASI
		BENTUK KEGIATAN	CAKUPAN KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN		
PRIORITAS PROGRAM PROGRAM KERJA 5. Penguatan Kelembagaan BPD, LKD, Bapel JPS, Lembaga Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM, Lembaga Pengelola Makam dan Lapangan Desa						
1. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG EMPATIK DAN BERTANGGUNG JAWAB 5. Penguatan Kelembagaan BPD, LKD DAN LEMBAGA DESA LAINNYA						
1	Pemberian Operasional dan Fasilitas kegiatan	Melakukan penghitungan kebutuhan operasional lembaga dalam satu tahun, menyusun kejurdes tentang pemberian bantuan keuangan kepada :	Kejurdes tentang pemberian bantuan keuangan kepada :	Carik dan Pejabat Struktural Desa		
a	BPD	BPD	BPD			
b	LPMD	LPMD	LPMD			
c	TP PKK	TP PKK	TP PKK			
d	Paguyuban RT	Paguyuban RT	Paguyuban RT			
e	Karang Taruna	Karang Taruna	Karang Taruna			
f	Bapel JPS	Bapel JPS	Bapel JPS			
g	Lembaga Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM	Lembaga Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM	Lembaga Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM			
h	Lembaga Pengelola Makam dan Lapangan Desa	Lembaga Pengelola Makam dan Lapangan Desa	Lembaga Pengelola Makam dan Lapangan Desa			
2	Pemberian Tunjangan BPD	Melakukan penghitungan kebutuhan pemenuhan hak BPD atas uang kehormatan, menyusun kejurdes tentang pemberian uang kehormatan bagi BPD	kejurdes pemberian hak kejurdes pemberian uang kehormatan BPD	Carik dan Pejabat Struktural Desa		
3	Pemberian Insentif Ketua RT	Melakukan penghitungan kebutuhan pemenuhan hak Ketua RT atas insentif dan menyusun kejurdes tentang pemberian insentif bagi Ketua RT	kejurdes pemberian insentif bagi ketua RT	Carik dan Pejabat Struktural Desa		

NO	DAFTAR KEGIATAN INDIKATIF	USULAN			TIM PENGELOLA KEGIATAN	REKOMENDASI
		BENTUK KEGIATAN	CAKUPAN KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN		
4	Peningkatan Sarana dan Prasarana BPD dan LKD					
	a Fasilitasi Ruang Sidang BPD	Melakukan perencanaan penggunaan ruang ex kesra sebagai rg sidang BPD		Tersedianya ruang sidang BPD	Carik dan Pejabat Struktural Desa	
	b Fasilitasi Ruang Sekretariat bersama LKD	Melakukan penataan ruang sekretariat LPMD sebagai sekber LKD		Tersedianya ruang sekretariat LPMD	Carik dan Pejabat Struktural Desa	
		Melakukan kegiatan pengadaan sarana administrasi RT/Pokhn		Tersedianya sarana administrasi RT/pdkhn	Carik dan Pejabat Struktural Desa	
5	Peningkatan kapasitas BPD dan LKD		Menyusun silabus dan menyelenggarakan kegiatan pelatihan	Terdapatnya dokumen silabus pelatihan dan terlaksananya pelatihan	Carik dan Pejabat Struktural Desa	
	a. BPD		Menyusun silabus dan menyelenggarakan kegiatan pelatihan	Terdapatnya dokumen silabus pelatihan dan terlaksananya pelatihan	Carik dan Pejabat Struktural Desa	
	b. RT		Menyusun silabus dan menyelenggarakan kegiatan pelatihan	Terdapatnya dokumen silabus pelatihan dan terlaksananya pelatihan	Carik dan Pejabat Struktural Desa	
	c. Pokglat LPMD		Menyusun silabus dan menyelenggarakan kegiatan pelatihan	Terdapatnya dokumen silabus pelatihan dan terlaksananya pelatihan	Carik dan Pejabat Struktural Desa	
PRIORITAS PROGRAM : 1. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG EMPATIK DAN BERTANGGUNG JAWAB						
PROGRAM KERJA : 6. Penguatan Kelembagaan Linmas Desa						
6	Penguatan Kelembagaan Linmas		Menyusun silabus pelatihan dan menyelenggarakan pelatihan	Terdapatnya dokumen silabus pelatihan dan terlaksananya pelatihan	Carik dan Pejabat Struktural Desa	
	Fasilitasi Pelatihan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan		Menyusun silabus pelatihan dan menyelenggarakan pelatihan	Terdapatnya dokumen silabus pelatihan dan terlaksananya pelatihan	Carik dan Pejabat Struktural Desa	

NO	DAFTAR KEGIATAN INDIKATIF	USULAN			TIM PENGELOLA KEGIATAN	REKOMENDASI
		BENTUK KEGIATAN	CAKUPAN KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN		
		3 Pengadaan sarana komunikasi satlinmas , seragam linmas dan Lampu center parkir	Menghitung kebutuhan HT, melakukan keg pengadaan HT, Seragam Linmas dan Lampu center parkir	Terdapatnya sarana komunikasi satlinmas berupa HT, seragam linmas dan lampu center parkir	Carik dan Pejabat Struktural Desa	
PRIORITAS PROGRAM : 1. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG EMPATIK DAN BERTANGGUNG JAWAB PROGRAM KERJA : 7. INVENTARISASI DAN PENGELOLAAN ASET DESA						
7	Inventarisasi dan Pengelolaan Aset desa	1 Inventarisasi Aset dan Kekayaan Desa	Melakukan kegiatan stock opname atas aset dan kekayaan desa	Terdapatnya dokumen aset dan kekayaan desa	Carik dan Pejabat Struktural Desa	
		2 Perlindungan dan Pemanfaatan Aset dan Kekayaan Desa	Menyusun panduan pengelolaan aset dan kekayaan desa, pembuatan sistem register aset dan kekayaan desa	Terdapatnya panduan tentang pengelolaan dan pemanfaatan aset dan kekayaan desa	Carik dan Pejabat Struktural Desa	
		3 Digitalisasi data tanah desa	Melakukan digitalisasi data tanah desa	Terdapatnya dokumen data tanah dalam bentuk digital	Carik dan Pejabat Struktural Desa	
PRIORITAS PROGRAM : 1. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG EMPATIK DAN BERTANGGUNG JAWAB PROGRAM KERJA : 8. PENINGKATAN WAWASAN KEBANGGSAAN						
8	Penyelenggaraan Kegiatan berwawasan kebangsaan	1 Peringatan 17an	Mengkoordinasikan pengiriman delegasi utk mengikuti peringatan 17an	Tertaksananya pengiriman delegasi untuk mengikuti rangkaian acara 17an	Carik dan Pejabat Struktural Desa	
		2 Pelaksanaan Pilkada	Merencanakan kegiatan fasilitasi KPU dalam kegiatan pilkada	Tertaksananya kegiatan fasilitasi pelaksanaan pilkada	Carik dan Pejabat Struktural Desa	
		3 Peringatan Hari Jadi Kab bentul	Mengkoordinasikan pengiriman delegasi untuk mengikuti hari jadi kab	Tertaksananya pengiriman delegasi untuk mengikuti rangkaian hari jadi kabupaten	Carik dan Pejabat Struktural Desa	

NO	DAFTAR KEGIATAN INDIKATIF	USULAN			TIM PENGELOLA KEGIATAN	REKOMENDASI
		BENTUK KEGIATAN	CAKUPAN KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN		
PRIORITAS PROGRAM PROGRAM KERJA : 1. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG EMPATIK DAN BERTANGGUNG JAWAB : 9. PENYUSUNAN DAN PENGUNDANGAN PRODUK HUKUM DESA						
9	1 Penyusunan Produk Hukum Desa	1 Perdes tentang RKPDes 2015	Menyusun dokumen raperdes tentang RKPDes 2015	Perdes tentang RKPDes 2015	Carik dan Pejabat Struktural Desa	
		2 Perdes tentang APBDes 2015 dan APDesa Perub 2015	Menyusun dokumen raperdes tentang APBDesa 2015 dan APDesa Perub 2015	Perdes tentang APBDesa dan APBDesa Perub 2015	Carik dan Pejabat Struktural Desa	
		3 Perdes tentang Perhitungan Anggaran 2014	Menyusun dokumen raperdes tentang Perhitungan Anggaran 2015	Perdes Perhitungan Anggaran 2015	Carik dan Pejabat Struktural Desa	
		4 Perdes tentang Pungutan Desa	Menyusun dokumen raperdes tentang Pungutan Desa	Perdes Pungutan Desa	Carik dan Pejabat Struktural Desa	
		5 Perdes tentang pengelolaan tanah desa	Menyusun dokumen raperdes tentang Pengelolaan Tanah Desa	Perdes Pengelolaan Tanah Desa	Carik dan Pejabat Struktural Desa	
		6 Perdes tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Menyusun dokumen raperdes tentang keuangan desa	Perdes Keuangan Desa	Carik dan Pejabat Struktural Desa	
		7 Perdes tentang SOTK Pemerintahan Desa	Menyusun dokumen raperdes tentang SOTK	Perdes SOTK	Carik dan Pejabat Struktural Desa	
		8 Perdes tentang Pengadaan Barang dan Jasa Desa	Menyusun dokumen raperdes tentang Pengadaan Barang dan Jasa Desa	Perdes Pengadaan Barang dan Jasa Desa	Carik dan Pejabat Struktural Desa	
		9 Perdes tentang Pengelolaan Aset dan Kekayaan Desa	Menyusun dokumen raperdes tentang Pengelolaan Aset dan Kekayaan Desa	Perdes Pengelolaan Aset dan Kekayaan Desa	Carik dan Pejabat Struktural Desa	
		10 Perdes tentang Pengelolaan Informasi Desa	Menyusun dokumen raperdes tentang Pengelolaan Informasi Desa	Perdes Pengelolaan Informasi Desa	Carik dan Pejabat Struktural Desa	

NO	DAFTAR KEGIATAN INDIKATIF	USULAN				TIM PENGELOLA KEGIATAN	REKOMENDASI
		BENTUK KEGIATAN	CAKUPAN KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN			
	11 Perdes tentang Perubahan Badan Hukum BUMDesa	Menyusun dokumen raperdes tentang Perubahan desdes bumdesa	Menyusun dokumen raperdes tentang Perubahan BUMDesa	Perdes Perubahan atas Perdes Pembentukan BUMDesa	Perdes Perubahan atas Perdes Pembentukan BUMDesa	Carik dan Pejabat Struktural Desa	
	12 Perdes tentang Pendirian LPBH dan HAM	Menyusun dokumen raperdes tentang Pendirian LPBH dan HAM	Menyusun dokumen raperdes tentang Pendirian LPBH dan HAM	Perdes tentang Pendirian LPBH dan HAM	Perdes tentang Pendirian LPBH dan HAM	Carik dan Pejabat Struktural Desa	
	13 Perdes tentang Pengelolaan Makam dan Lapangan Desa	Menyusun dokumen raperdes tentang Pengelolaan Makam dan Lapangan Desa	Menyusun dokumen raperdes tentang Pengelolaan Makam dan Lapangan Desa	Perdes tentang Pengelolaan Makam dan Lapangan Desa, Perlurdes tentang Pedoman Pengelolaan, Keplurdes Pengangkatan Pengelola	Perdes tentang Pengelolaan Makam dan Lapangan Desa, Perlurdes tentang Pedoman Pengelolaan, Keplurdes Pengangkatan Pengelola	Carik dan Pejabat Struktural Desa	
	14 Perdes tentang Pengaturan dan Pengawasan Pondokan	Menyusun dokumen raperdes tentang pengaturan dan pengawasan pondokan	Menyusun dokumen raperdes tentang pengaturan dan pengawasan pondokan	Perdes tentang Pengaturan dan Pengawasan Pondokan, Perlurdes tentang Pedoman Pelaksanaan	Perdes tentang Pengaturan dan Pengawasan Pondokan, Perlurdes tentang Pedoman Pelaksanaan	Carik dan Pejabat Struktural Desa	
	15 Perdes tentang Pelembagaan Bapel JPS menjadi lembaga desa	Menyusun dokumen raperdes tentang pendirian Bapel JPS (Naskah Akademik)	Menyusun dokumen raperdes tentang pendirian Bapel JPS (Naskah Akademik)	Perdes tentang Pendirian Bapel JPS, Perlurdes tentang Pedoman Pelaksanaan, Keplurdes tentang pengangkatan pengelola	Perdes tentang Pendirian Bapel JPS, Perlurdes tentang Pedoman Pelaksanaan, Keplurdes tentang pengangkatan pengelola	Carik dan Pjbt Struktural Desa, Bapel JPS, LBH BA	
	16 Perdes tentang Pelembagaan Pusat Studi Desa menjadi lembaga desa	Menyusun dokumen raperdes tentang pendirian Pusat Studi Desa (PSD) (Naskah Akademik)	Menyusun dokumen raperdes tentang pendirian Pusat Studi Desa (PSD) (Naskah Akademik)	Perdes tentang Pendirian PSD, Perlurdes tentang Pedoman Pelaksanaan, Keplurdes tentang pengangkatan pengelola	Perdes tentang Pendirian PSD, Perlurdes tentang Pedoman Pelaksanaan, Keplurdes tentang pengangkatan pengelola	Carik dan Pejabat Struktural Desa, PSD, LBH BA	
	17 Perdes tentang Pelembagaan Desa Budaya menjadi lembaga desa	Menyusun dokumen raperdes tentang pendirian Lembaga Desa Budaya (LDB) (Naskah Akademik)	Menyusun dokumen raperdes tentang pendirian Lembaga Desa Budaya (LDB) (Naskah Akademik)	Perdes tentang Pendirian LDB, Perlurdes tentang Pedoman Pelaksanaan, Keplurdes tentang pengangkatan pengelola	Perdes tentang Pendirian LDB, Perlurdes tentang Pedoman Pelaksanaan, Keplurdes tentang pengangkatan pengelola	Carik dan Pejabat Struktural Desa, SC LDB, LBH BA	
	18 Perdes tentang Pelembagaan Pos Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM menjadi lembaga desa	Menyusun dokumen raperdes tentang pendirian Lembaga Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM (LPBH dan HAM) (Naskah Akademik)	Menyusun dokumen raperdes tentang pendirian Lembaga Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM (LPBH dan HAM) (Naskah Akademik)	Perdes tentang Pendirian LPBH dan HAM, Perlurdes tentang Pedoman Pelaksanaan, Keplurdes tentang pengangkatan pengelola	Perdes tentang Pendirian LPBH dan HAM, Perlurdes tentang Pedoman Pelaksanaan, Keplurdes tentang pengangkatan pengelola	Carik dan Pejabat Struktural Desa, LBH BA	
9	2 Pengundangan produk hukum desa	Sosialisasi produk hukum desa	Menyusun rancangan kegiatan sosialisasi produk hukum desa	Terlaksananya kegiatan sosialisasi produk hukum desa	Terlaksananya kegiatan sosialisasi produk hukum desa	Carik dan Pengelola Informasi Desa, LPBH dan HAM	

NO	USULAN			REKOMENDASI	
	DAFTAR KEGIATAN INDIKATIF	BENTUK KEGIATAN	CAKUPAN KEGIATAN		KELUARAN KEGIATAN
PRIORITAS PROGRAM PROGRAM KERJA : 1. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG EMPATIK DAN BERTANGGUNG JAWAB : 10. PELEMBAGAAN PARTISIPASI MASYARAKAT					
10	1 Pelembagaan Bapel JPS	Pelembagaan Bapel JPS menjadi lembaga desa	Menyusun raperdes pendirian Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial dan aturan pelaksanaannya	Perdes tentang pendirian Bapel JPS, Peraturan tentang Pedoman Pelaksanaan Bapel JPS, Keplurdes tentang Pengangkatan Pengurus Bapel JPS	Carik dan Pejabat Struktural Desa, LBH Bumi Adli, Bapel JPS
2	Pelembagaan Pusat Studi Desa	Pelembagaan Pusat Studi Desa menjadi lembaga desa	Menyusun raperdes pendirian Pusat Studi Desa dan aturan pelaksanaannya	Perdes tentang pendirian Pusat Studi Desa, Peraturan tentang Pedoman Pelaksanaan Pusat Studi Desa, Keplurdes tentang Pengangkatan Pengurus Pusat Studi Desa	Carik dan Pejabat Struktural Desa, LBH Bumi Adli, Pusat Studi Desa
3	Pelembagaan Desa Budaya	Pelembagaan Desa Budaya menjadi lembaga desa	Menyusun raperdes pendirian Desa Budaya dan aturan pelaksanaannya	Perdes tentang pendirian Desa Budaya, Peraturan tentang Pedoman Pelaksanaan Desa Budaya, Keplurdes tentang Pengangkatan Pengurus Desa Budaya	Carik dan Pejabat Struktural Desa, LBH Bumi Adli, SC Desa Budaya
4	Pendirian Lembaga Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM	Pelembagaan Pos Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM menjadi lembaga desa	Menyusun raperdes pendirian Lembaga Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM (LPBH dan HAM) dan aturan pelaksanaannya	Perdes tentang pendirian LPBH dan HAM, Peraturan tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM, Keplurdes tentang Pengangkatan Pengurus LPBH dan HAM	Carik dan Pejabat Struktural Desa, LBH Bumi Adli
TOTAL RENCANA ANGGARAN BIDANG TAPEM					
PRIORITAS PROGRAM PROGRAM KERJA : 2. PENGANTASAN KEMISKINAN : 1. PENGEMBANGAN BASIS DATA KEMISKINAN BERBASIS KOMUNITAS					
2	1 Pendataan Kemiskinan Berbasis Komunitas	1 Pendataan Pedoman Pendataan Kemiskinan Berbasis Komunitas	Penyusunan indikator kemiskinan dg menggunakan persepsi masyarakat sbg dasar penyusunan data kemiskinan	Buku Pedoman Pendataan Kemiskinan Berbasis Komunitas	Kesra Agama - PAKARTI

NO	DAFTAR KEGIATAN INDIKATIF	USULAN			TIM PENGELOLA KEGIATAN	REKOMENDASI
		BENTUK KEGIATAN	CAKUPAN KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN		
		2 Pendataan Data Kemiskinan Berbasis Komunitas	Pelaksanaan pendataan kemiskinan dg berpedoman pd indikator yg telah disusun	Terdapatnya Peta Kemiskinan Desa		
PRIORITAS PROGRAM : 2. PENGENTASAN KEMISKINAN						
PROGRAM KERJA : 2. PENGENTASAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN						
2	Program pengentasan dan penanggulangan kemiskinan	1 Pengentasan dan penanggulangan kemiskinan non wabin P2WKSS	Formulasi program, pembentukan tim pendamping program, implementasi program	Formulasi program, terdapatnya tim pendamping serta terimplementasinya program	Kesra Agama -TPK Desa	
		2 Pengentasan dan penanggulangan kemiskinan wabin P2WKSS	Penyusunan program bagi wabin P2WKSS	Tersusunnya program bagi wabin P2WKSS	Carik Desa - TP PKK	
PRIORITAS PROGRAM : 2. PENGENTASAN KEMISKINAN						
PROGRAM KERJA : 3. PENGUATAN KELEMBAGAAN BAPEL JPS						
2	3 Penguatan Kelembagaan Bapel JPS	1 Restrukturisasi Bapel JPS	Restrukturisasi Bapel JPS	Terbentuknya kepengurusan Bapel JPS yang definitif	Kesra Agama - Bapel JPS	
		2 Fasilitasi biaya operasional Bapel JPS	Fasilitasi anggaran operasional	Peran optimal lembaga dalam pelaksanaan JPS		
PRIORITAS PROGRAM : 2. PENGENTASAN KEMISKINAN						
PROGRAM KERJA : 4. PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)						
2	4 Peningkatan Fasilitas RTLH	1 Bantuan sosial peningkatan kualitas RTLH Non Wabin P2WKSS	Pemberian Bantuan Sosial bagi RTLH Non Wabin P2WKSS	Terlaksananya keg peningkatan kualitas RTLH non Wabin P2WKSS	Kesra Agama - TP PKK - CUCT	

NO	DAFTAR KEGIATAN INDIKATIF	USULAN			TIM PENGELOLA KEGIATAN	REKOMENDASI
		BENTUK KEGIATAN	CAKUPAN KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN		
		2 Bantuan sosial peningkatan kualitas RTLH Wabin P2WKSS	Pemberian Bantuan Sosial bagi RTLH Wabin P2WKSS	Terlaksananya keg pening katan kualitas RTLH Wabin P2WKSS	Kesra - Agama - TP PKK - CUCT	
PRIORITAS PROGRAM PROGRAM KERJA : 3. PENDIDIKAN DAN AGAMA : 1. Penguatan Kelembagaan PAUD DAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL LAINNYA						
3	1 Penguatan Kelembagaan TK	1 Penguatan kelembagaan TK yg dikelola oleh PIP (Peritwi 62) atau oleh pedukuhan pokglat /kai PKK)	1 Fasilitasi pengurusan ijin kelembagaan, fasilitasi peningkatan sarana pembelajaran	Terlaksananya kegiatan peningkatan kelembagaan TK yang dikelola oleh PIP dan pokglat / kai PKK Pedukuhan	Kesra Agama - PIP	
		2 Penguatan kelembagaan GOPTKI	Pemberian bantuan untuk dukungan kegiatan GOPTKI	Terlaksananya pemberian bantuan untuk dukungan keg GOPTKI	Kesra Agama	
		2 Peningkatan kesejahteraan guru TK non GTT (TK Peritwi 62)	Pemberian tambahan penghasilan bagi guru TK non GTT	Terlaksananya keg peningkatan kesejahteraan guru TK non GTT	Kesra Agama	
		3 Penguatan Kelembagaan PAUD dan BKB pedukuhan	Fasilitasi pengurusan ijin kelem bagaan, fasilitasi peningkatan sarana pembelajaran	Terlaksananya peningkatan kelembagaan PAUD dan BKB Pedukuhan	Kesra Agama - TP PKK	
		4 Peningkatan kapasitas kader PAUD	Pendidikan dan Pelatihan berkelanjutan bagi kader PAUD	Rancangan jadwal, materi dan peserta (12 materi - 4 pertemuan)	Kesra Agama	
		5 Penguatan Kelembagaan TPA/TPQ	Fasilitasi Pengurusan Ijin Kelembagaan TPA/TPQ, Fasilitasi peningkatan sarana	Terlaksananya keg penguatan kelembagaan TPA / TPQ	Kesra Agama - PCA - Muslimat NU	
		6 Peningkatan kapasitas asatidz TPA	Pendidikan dan Pelatihan berkelanjutan bagi asatidz TPA/TPQ	Rancangan jadwal, materi dan peserta (12 materi - 4 pertemuan)	Kesra Agama - PCA - Muslimat NU	

NO	DAFTAR KEGIATAN INDIKATIF	USULAN			TIM PENGELOLA KEGIATAN	REKOMENDASI
		BENTUK KEGIATAN	CAKUPAN KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN		
7	Penguatan kelembagaan PKBM dan Perpustakaan Mandiri	1 Penguatan kelembagaan PKBM dan Perpustakaan Mandiri 2 Bantuan operasional pengelolaan perpustakaan desa	Fasilitasi peningkatan sarana PKBM / Perpustakaan Mandiri Fasilitasi biaya operasional perpustakaan desa	Terlaksananya keg peningkatan sarana PKBM /Perpustakaan Mandiri Terlaksananya pemberian biaya operasional perpustakaan desa	Kesra Agama - Radio Buku Kesra Agama	
PRIORITAS PROGRAM : 3. PENDIDIKAN DAN AGAMA						
PROGRAM KERJA						
3	Peningkatan pra sarana pendidikan non formal	1 Bantuan peningkatan prasarana BKB Cempaka 2 Bantuan peningkatan pra sarana TK/PAUD pedukuhan	Pemberian Bantuan hibah pembangunan ruang kelas BKB Cempaka Pemberian bantuan hibah peningkatan prasarana TK/PAUD pedukuhan	Terlaksananya pembangunan ruang kelas BKB Cempaka Terlaksananya peningkatan prasarana TK/PAUD	Kesra Agama - LPMD Kesra Agama - Pandu	
PRIORITAS PROGRAM : 3. PENDIDIKAN DAN AGAMA						
PROGRAM KERJA						
3	Peningkatan kehidupan beragama	1 Bantuan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di pedukuhan 2 Penyelenggaraan kegiatan keagamaan oleh Desa - Buka Bersama - Safari Romadlon - Syawalan - Pengajian Sloslo Kliwon	Pemberian bantuan untuk PHBI/PHBA di pedukuhan Penyelenggaraan kegiatan keagamaan di di desa	Terlaksananya PHBA/PHBI di pedukuhan Terlaksananya kegiatan keagamaan di desa	Kesra Agama Kesra Agama Kesra Agama Kesra Agama Kesra Agama	

NO	DAFTAR KEGIATAN INDIKATIF	USULAN			TIM PENGELOLA KEGIATAN	REKOMENDASI
		BENTUK KEGIATAN	CAKUPAN KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN		
		<ul style="list-style-type: none"> - Tasmul Qur'an - Pengajian Suryo Chondro - Pembentukan dan Pembinaan Forum Takmir Masjid 			PR NU PCM PCM	
		<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan kegiatan keagamaan oleh Desa - lanjutan - Kajian Keagamaan - Lepas Sambut Haji - Peringatan PHBA - Santunan Fakir Miskin dan Anak Yatim Piatu 			LDII IPHI Kesra Agama Kesra Agama - PKK - Bapel JPS	
2	Penguatan fungsi kelembagaan Takmir Masjid	Fasilitasi Pendirian Forum Silaturahmi Takmir Masjid	Pendirian forum silaturahmi Takmir Masjid	Berdirinya forum silaturahmi takmir masjid	Kesra Agama - PR NU - PCA - LDII	
3	Pembinaan Kaum Rois	Fasilitasi pertemuan kaum rois	Pendidikan dan Pelatihan berkelanjutan bagi kaum rois	Rancangan Jadwal, Materi dan Peserta	Kesra Agama - Paguyuban Kaum Rois	
4	Pengembangan pra sarana peribadatan	Bantuan peningkatan pra sarana peribadatan	Pemberian bantuan hibah peningkatan prasarana peribadatan	Tetaksananya kegiatan peningkatan prasarana peribadatan	Kesra Agama - Pandu	

NO	DAFTAR KEGIATAN INDIKATIF	USULAN		TIM PENGELOLA KEGIATAN	REKOMENDASI
		BENTUK KEGIATAN	CAKUPAN KEGIATAN		
PRIORITAS PROGRAM : 3. PENDIDIKAN DAN AGAMA PROGRAM KERJA : 4. PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH					
3	Penguatan Keluarga menuju Keluarga Sakinah	a Fasilitasi Pembentukan Kader Mitra Keluarga Sakinah	Fasilitasi Pertemuan Pembentukan Kader Mitra Keluarga Sakinah	Terbentuknya Kader Mitra Keluarga Sakinah	Kesra Agama - TP PKK - KUA
		b Fasilitasi Pelatihan Kader Mitra Keluarga Sakinah	Fasilitasi Pelatihan Kader Mitra Keluarga Sakinah	Terlaksananya pelatihan Kader Mitra Keluarga Sakinah	Kesra Agama - TP PKK - KUA
PRIORITAS PROGRAM : 3. PENDIDIKAN DAN AGAMA PROGRAM KERJA : 5. FASILITASI KEGIATA MTQ TINGKAT KECAMATAN					
3	Bantuan Pelaksanaan MTQ	Bantuan pelaksanaan MTQ Tk Kecamatan	Pemberian bantuan pelaksanaan MTQ	Terlaksananya pemberian bantuan pelaksanaan MTQ	Kesra Agama
PRIORITAS PROGRAM : 3. PENDIDIKAN DAN AGAMA PROGRAM KERJA : 6. PEMBINAAN ANAK DAN KEPEMUDAAN					
3	1 Penguatan kelembagaan organisasi kepemudaan pedukuhan	Fasilitasi penguatan kelembagaan organisasi kepemudaan pokhkn	Pemberian bantuan keuangan guna mendukung keg kepemudaan tingkat pokhkn	Terlaksananya keg pemberian bantuan keuangan kepada organisasi kepemudaan pdkhn	Kesra Agama - KTCA
	2 Pembinaan Pemuda Putus Sekolah	Fasilitasi diklat bagi Pemuda Putus Sekolah	Pelaksanaan diklat bagi pemuda putus sekolah	Terlaksananya keg diklat bagi pemuda putus sekolah	Kesra Agama - KTCA
	3 Pembentukan & pembinaan forum anak desa	Fasilitasi pembentukan dan pembinaan forum anak			
				35	

NO	USULAN			TIM PENGELOLA KEGIATAN	REKOMENDASI
	DAFTAR KEGIATAN INDIKATIF	BENTUK KEGIATAN	CAKUPAN KEGIATAN		
PRIORITAS PROGRAM : 3. PENDIDIKAN DAN AGAMA					
PROGRAM KERJA : 7. PENDAMPINGAN KELUARGA DENGAN ANAK PUTUS SEKOLAH					
3	Pendampingan Keluarga Anak Putus Sekolah	Fasilitasi pendampingan keluarga dg anak putus sekolah	Penyusunan data keluarga dengan anak putus sekolah Pendampingan keluarga dengan anak putus sekolah	Terdapatnya data keluarga dengan anak putus sekolah Rancangan program dan pelaksanaan pendampingan	Kesra Agama - TP PKK - Bapel JPS - Fonaba
PRIORITAS PROGRAM : 4. KESEHATAN					
PROGRAM KERJA : 1. PERLINDUNGAN KESEHATAN IBU DAN ANAK DAN KELOMPOK RENTAN LAINNYA					
4	1 Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	Fasilitasi Pendampingan Hamil Resiko Tinggi	Penyusunan data ibu hamil resiko tinggi Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	Terdapatnya data ibu hamil resiko tinggi Tertaksananya keg pendampingan ibu hamil resiko tinggi	Kesra Agama - TP PKK - Bapel JPS
	2 Pendampingan Keluarga Dengan Anak Gizi Buruk	Fasilitasi Pendampingan Keluarga Dengan Anak Gizi Buruk	Penyusunan Data Keluarga Dengan Anak Gizi Buruk Pendampingan Keluarga Dengan Anak Gizi Buruk	Terdapatnya data keluarga dengan anak gizi buruk Tertaksananya kegiatan pendampingan dengan anak gizi buruk	Kesra Agama - TP PKK - Bapel JPS
	3 Pendampingan Keluarga Dengan Anak Difable	Fasilitasi Pendampingan Keluarga Dengan Anak Difable	Penyusunan Data Keluarga Dengan Anak Difable Pendampingan Keluarga Dengan Anak Difable	Terdapatnya data keluarga dengan anak difable Tertaksananya keg pendampingan dengan anak difable	Kesra Agama - TP PKK - Bapel JPS
	4 Pendampingan Lansia Terlantar	Fasilitasi Pendampingan Lansia Terlantar	Penyusunan Data Lansia Terlantar Pendampingan Lansia Terlantar	Terdapatnya data lansia terlantar Tertaksananya kegi pendamping an lansia terlantar	Kesra Agama - TP PKK - Bapel Kesra Agama - TP PKK - Bapel JPS

NO	DAFTAR KEGIATAN INDIKATIF	USULAN			TIM PENGELOLA KEGIATAN	REKOMENDASI
		BENTUK KEGIATAN	CAKUPAN KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN		
5	Penguatan Kelembagaan Kelompok Lansia Produktif	Fasilitasi Penguatan kelembagaan kelompok lansia produktif	Pendampingan kelompok lansia produktif	Terlaksananya keg pendampingan kelompok lansia produktif	Kesra Agama - kelompok lansia produktif	
			Pelaksanaan Senam Lansia	Terlaksananya keg senam lansia	Kesra Agama-kel lansia produktif	
PRIORITAS PROGRAM : 4. KESEHATAN PROGRAM KERJA : 2. Penguatan Kelembagaan Posyandu						
1	Penguatan kelembagaan posyandu balita	Fasilitasi penguatan kelembagaan posyandu balita	Pemberian bantuan keuangan guna mendukung kegiatan posyandu balita	Terlaksananya pemberian bantuan keuangan guna mendukung kegiatan posyandu balita	Kesra Agama - TP PKK	
2	Pertuasan fungsi sosial dasar posyandu balita	Fasilitasi pelatihan keterpaduan PAUD-Posyandu-BKB	Pelatihan pengelolaan kelembagaan BKB, pelatihan administrasi BKB	Terlaksananya keg perluasan fungsi sosial dasar posyandu balita melalui BKB	Kesra Agama - TP PKK	
3	Peningkatan kapasitas kader posyandu Balita	Peningkatan kapasitas kader posyandu	Pendidikan dan Pelatihan berkelanjutan	Rancangan jadwal, materi dan peserta	Kesra Agama	
4	Monitoring Posyandu Balita	Pertombaan Lomba Posyandu	Monitoring posyandu melalui lomba posyandu	Terlaksananya monitoring posyandu	Kesra Agama - TP PKK	
5	Penguatan kelembagaan posyandu lansia	Fasilitasi penguatan kelembagaan posyandu lansia	Pemberian bantuan keuangan guna mendukung keg posyandu lansia	Terlaksananya pemberian bantuan keuangan guna mendukung kegiatan posyandu lansia	Kesra Agama - TP PKK	

NO	DAFTAR KEGIATAN INDIKATIF	USULAN			TIM PENGELOLA KEGIATAN	REKOMENDASI
		BENTUK KEGIATAN	CAKUPAN KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN		
6	Peningkatan kapasitas kader posyandu Lansia	Peningkatan kapasitas kader posyandu	Pendidikan dan Pelatihan berkelanjutan	Rancangan jadwal, materi dan peserta	Kesra Agama	

PRIORITAS PROGRAM PROGRAM KERJA

: 4. KESEHATAN

: 3. Penguatan Kapasitas Kader Kesehatan, Kader KB - KS dan KP Ibu

1	Peningkatan Kapasitas Kader Sehat (PHBS)	a Peningkatan kapasitas kader kesehatan b Fasilitasi tindak lanjut kegiatan STBM	Fasilitasi penyuluhan kader sehat dan fasilitasi PSN Fasilitasi Kegiatan STBM	Terlaksananya pen yuluhan kader sehat dan fasilitasi PSN Terlaksananya kegiatan tindak lanjut STBM	Kesra Agama - TP PKK - Kader Sehat Kesra Agama - TP PKK - Kader Sehat	
2	Peningkatan Kapasitas Kader KB-KS	a Fasilitasi pertemuan kader KB-KS b Pemberian Insentif bagi Kader PPKBD	Fasilitasi pertemuan kader KB-KS Pemberian insentif bagi kader PPKBD	Terlaksananya pertemuan kader KB-KS Terlaksananya pemberian insentif kader PPKBD	Kesra Agama - TP PKK - Kader KB KS Kesra Agama - TP PKK - Kader KB KS	
3	Pemantapan Kontrasepsi Mantap	Fasilitasi kegiatan pemantapan kontrasepsi mantap	Fasilitasi kegiatan pemantapan kontrasepsi mantap	Fasilitasi keg pemantapan kontrasepsi mantap	Kesra Agama - TP PKK - Kader KB KS	
4	Peningkatan Kapasitas Kader KP Ibu	a Fasilitasi pertemuan kader KP Ibu b Fasilitasi pelatihan kader KP Ibu	Fasilitasi pertemuan kader KP Ibu Fasilitasi pelatihan kader KP Ibu	Terlaksananya pertemuan kader KP Ibu Terlaksananya kegiatan pelatihan kader KP Ibu	Kesra Agama - TP PKK Kesra Agama - TP PKK - Kader KP Ibu	

NO	DAFTAR KEGIATAN INDIKATIF	USULAN			TIM PENGELOLA KEGIATAN	REKOMENDASI
		BENTUK KEGIATAN	CAKUPAN KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN		
		c	Fasilitasi kegiatan mentoring KP Ibu	Fasilitasi mentoring kader KP IBU	Terlaksananya kegiatan mentoring KP Ibu	Kesra Agama - TP PKK -Kader KP Ibu
PRIORITAS PROGRAM : 5. BUDAYA DAN PARIWISATA						
PROGRAM KERJA : 1. PENETAPAN DESA BUDAYA						
8	Pembentukan Pengelola Desa Budaya	a	Pembentukan Pengelola Desa Budaya	Fasilitasi pembentukan pengelola desa budaya	Terbentuknya pengelola desa budaya	Kesra Agama - SC Desa Budaya
		b	Fasilitasi bantuan operasional pengelola Desa Budaya	Fasilitasi bantuan operasional pengelola desa budaya	Terlaksananya kegiatan fasilitasi bantuan operasional pengelolaan desa budaya	Kesra Agama - SC Desa Budaya
PRIORITAS PROGRAM : 5. BUDAYA DAN PARIWISATA						
PROGRAM KERJA : 2. Penguatan Kelembagaan Kampung Wisata						
	Pengujian Kelembagaan Kampung Wisata		Fasilitasi Pelatihan Pengelola Kampung Wisata	Fasilitasi pelatihan pengelola kampung wisata	Terlaksananya keg pelatihan pengelola kampung wisata	Kesra Agama - Kampong Dolanan
PRIORITAS PROGRAM : 5. BUDAYA DAN PARIWISATA						
PROGRAM KERJA : 3. FASILITASI EVENT SENI, BUDAYA DAN PARIWISATA						
	Fasilitasi event seni budaya dan wisata	a	Festifal Seni Budaya Petukuhan dim rangka hari jadi desa	Fasilitasi pelaksanaan festifal seni budaya petukuhan	Terlaksananya keg festifal seni budaya petukuhan	Kesra Agama - Pengelola Desa Budaya
		b	Pengiriman kontingen seni dalam rangka hari jadi kab kabupaten	Fasilitasi pengiriman kontingen seni dalam rangka hari jadi kab	Terlaksananya kegiatan pengiriman kontingen seni dalam rangka hari jadi kab	Kesra Agama - Pengelola Desa Budaya

NO	DAFTAR KEGIATAN INDIKATIF	USULAN			REKOMENDASI
		BENTUK KEGIATAN	CAKUPAN KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	
PRIORITAS PROGRAM : 5. BUDAYA DAN PARIWISATA					
PROGRAM KERJA : 4. PENGUATAN LEMBAGA SENI DAN BUDAYA PEDUKUHAN					
	a Fasilitasi kelompok seni dan budaya pedukuhan	Fasilitasi biaya ops untuk kelompok seni dan budaya pedukuhan	Fasilitasi biaya operasional untuk kelompok seni dan budaya pedukuhan	Teriaksananya keg fasilitasi bantuan operasional kelompok seni budaya pedukuhan	Kesra Agama - Pengelola Desa Budaya
	b Fasilitasi kegiatan latihan macapatan	Fasilitasi kegiatan latihan macapatan	Fasilitasi kegiatan latihan macapatan	teriaksananya keg fasilitasi latihan macapatan	Kesra Agama - Pengelola Desa Budaya
	c Fasilitasi kostum Bergada Wiralamtama	Fasilitasi kostum Bergada Wiralamtama			
TOTAL RENCANA ANGGARAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT					
PRIORITAS PROGRAM : 6. PERTANIAN DALAM ARTI LUAS					
PROGRAM KERJA : 1. PENGUATAN PROGRAM PEMERINTAH SUPRA DESA BIDANG PERTANIAN					
5	1 Penguatan Program Pemerintah Supra Desa dalam bidang Pertanian	1 Fasilitasi bantuan operasional pelaksanaan SL	Fasilitasi anggaran, monitoring keg , evaluasi dampak keg (outcome)	Terdapatnya data dan peta potensi SDM, data analisa kegiatan SL	Ekbang -Gapoktan - BPP
		2 Fasilitasi bantuan operasional pelaksanaan P2BN	Fasilitasi anggaran, monitoring keg , evaluasi dampak keg (outcome)	Terdapatnya data dan peta potensi produksi beras, data analisa kegiatan P2BN	Ekbang -Gapoktan - BPP
	3 Pendampingan Kelompok Penerima Program Pertanian dari pemerintah supra desa	Pendampingan Kelompok Penerima Program Pertanian dari pemerintah supra desa	Pendataan, pemetaan potensi dan masalah, pendampingan dan penguatan kelembagaan	Terdapatnya data dan peta potensi sumber daya sosial pertanian, data analisa keg pertanian supra desa	Ekbang -Gapoktan - BPP

NO	DAFTAR KEGIATAN INDIKATIF	USULAN			TIM PENGELOLA KEGIATAN	REKOMENDASI	
		BENTUK KEGIATAN	CAKUPAN KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN			
2	Penguatan kapasitas kelembagaan gapoktan	1	Koordinasi dengan Gapoktan, Fasilitas refreshing kepengurusan, lengkapi legalitas kelembagaan (AD/ART, Akta Notaris, SK Pengukuhan dll)	Kepengurusan gapoktan baru, draft AD/ART, Akta Notaris pendirian, Keplurdes pengukuhan pengurus gapoktan	Ekbang -Gapoktan		
		2	Pendataan, pemetaan potensi dan masalah, fasilitasi bintek kelembagaan pertanian	Data peta potensi dan masalah, kegiatan bintek kelembagaan pertanian			Ekbang -Gapoktan
		3	Fasilitas ruang pelayanan penyuluh pertanian	Perencanaan penggunaan salah satu ruang gedung sayap selatan sbg pos pelayanan penyuluh pertanian			Terdapatnya pos pelayanan penyuluhan pertanian sekaligus dijadikan sbg sekber kelembagaan tani tingkat desa
3	Penguatan kapasitas kelembagaan PUAP	1	Fasilitas pelaksanaan refreshing kepengurusan PUAP	Koordinasi dengan Gapoktan, Fasilitas refreshing kepengurusan PUAP , lengkapi legalitas kelembagaan (AD/ART, Akta Notaris, SK Pengukuhan dll)	Kepengurusan PUAP baru, draft AD/ART, Akta Notaris pendirian, Keplurdes Pengukuhan pengurus PUAP	Ekbang - PUAP - KWT - BPP	
		2	Integrasi kelembagaan PUAP dalam Bank Desa	Penghitungan aset, inventarisasi dan verifikasi kreditur	Data aset, data kreditur, peta masalah dan potensi kreditur	Ekbang - PUAP - BPP	
4	Penguatan kapasitas kelembagaan Pokdakan	1	Fasilitas pembentukan pokdakan tingkat desa	Pendataan, pemetaan potensi dan masalah klmk perikanan pedukuhan, fasilitasi pembentukan pokdakan tingkat desa	Data peta potensi dan masalah kelompok perikanan, tentukannya pokdakan tingkat desa, Keplurdes pendirian pokdakan tingkat desa	Ekbang -Gapoktan - BPP	
		2	Fasilitas bintek kelembagaan perikanan	Pendataan, pemetaan potensi dan masalah, fasilitasi bintek kelembagaan perikanan	Data peta potensi dan masalah, kegiatan bintek kelembagaan perikanan	Ekbang -Gapoktan - BPP	
5	Penguatan kelembagaan KWT	1	Fasilitas refreshing kepengurusan KWT	Koordinasi dengan Gapoktan dan KWT, Fasilitas refreshing kepengurusan KWT , lengkapi legalitas kelembagaan (AD/ART, Akta Notaris, SK Pengukuhan dll)	Kepengurusan KWT baru, draft AD/ART, Akta Notaris pendirian, Keplurdes Pengukuhan pengurus KWT desa	Ekbang - KWT - BPP	
		2	Fasilitas bintek kelembagaan wanita tani	Pendataan, pemetaan potensi dan masalah, fasilitasi bintek kelembagaan wanita tani	Data peta potensi dan masalah, kegiatan bintek kelembagaan wanita tani	Ekbang - KWT - BPP	

NO	USULAN			TIM PENGELOLA KEGIATAN	REKOMENDASI
	DAFTAR KEGIATAN INDIKATIF	BENTUK KEGIATAN	CAKUPAN KEGIATAN		
6	Optimalisasi Lahan Pekarangan	Bantuan sarana optimalisasi lahan pekarangan	Pemetaan potensi dan masalah pemanfaatan lahan pekarangan, penyusunan daftar kebutuhan sarana optimalisasi lahan pekarangan, pendirian demplot pemanfaatan lahan pekarangan	Data potensi dan masalah, daftar kebutuhan sarana optimalisasi lahan pekarangan, demplot pemanfaatan lahan pekarangan	Ekbang - KWT - BPP
PRIORITAS PROGRAM : 7. PERDAGANGAN DAN PASAR TRADISIONAL PROGRAM KERJA : 1. PENDAMPINGAN IKM DAN KOPERASI					
6	Pendampingan IKM dan koperasi	1 Fasilitasi pengurusan perijinan IKM (UP2K) 2 Fasilitasi kerjasama pendampingan oleh perguruan tinggi 3 Pelatihan Perkoperasian 4 Pelatihan Kewirausahaan	Pendataan IKM Pangan wabin UP2K PKK, fasilitasi pengurusan perijinan Pendataan IKM Sepatu dan Tas, Koordinasi dg ATK, drafting MoU dan agenda pendampingan, fasilitasi kegiatan pendampingan Pendataan kreditur LKM ik desa, konsolidasi kredit, koordinasi dengan CU-CT, drafting MoU, fasilitasi kegiatan pendampingan Pemetaan potensi dan masalah kreditur hasil konsolidasi, perencanaan pelatihan, fasilitasi kegiatan pelatihan	Data IKM Pangan wabin UP2K PKK, ijin PI RT dari Dinkes Kab Data IKM Sepatu dan Tas, MoU pendampingan, kegiatan pendampingan Data konsolidasi kreditur, MoU dg CUCT, fasilitasi kegiatan dampangan Data peta masalah dan potensi kreditur hasil konsolidasi, fasilitasi kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi kreditur	Ekbang - TP PKK Ekbang - Pandu Ekbang - UP2K TP PKK - PUAP - UED SP - SPP UPK - UPK BKM - CUCT Ekbang - SG Bank Desa - CUCT
PRIORITAS PROGRAM : 7. PERDAGANGAN DAN PASAR TRADISIONAL PROGRAM KERJA : 2. SINKRONISASI KELEMBAGAAN PENGELOLA LKM TINGKAT DESA					
6	Sinkronisasi Kelembagaan Pengelola LKM Tingkat Desa	1 Penyusunan Studi Kelayakan Pendirian Bank Desa 2 Sinkronisasi Kelembagaan Pengelola LKM Tingkat Desa	Pendataan aset dan kreditur (by name, by address, by loan), konsolidasi kredit dan aset, analisa ekonomi bank desa	dokumen studi kelayakan usaha Bank Desa	Ekbang - Pengelola UED, UPK, PUAP, SPP - CUCT

NO	DAFTAR KEGIATAN INDIKATIF	USULAN		TIM PENGELOLA KEGIATAN	REKOMENDASI
		BENTUK KEGIATAN	CAKUPAN KEGIATAN		
	2	Konsolidasi Aset LKM Tingkat Desa	Konsolidasi aset dan kredit, drafting skema dan akta merger, drafting perdes dan peraturan turunannya	dokumen studi kelayakan usaha Bank Desa	Ekbang - CUUCT - LPBH dan HAM
PRIORITAS PROGRAM : 7. PERDAGANGAN DAN PASAR TRADISIONAL					
PROGRAM KERJA : 3. PENGUATAN KELEMBAGAAN BUMDESA					
6	Penguatan Kelembagaan BUMDesa	a Perubahan Badan Hukum Menjadi PT	Pengkajian aturan hukum, koordinasi dengan calon shareholder, drafting MoU, pengurusan badan hukum	Naskah akademik Perdes perubahan badan hukum, skema kepemilikan, badan hukum PT	Ekbang - Carik LPBH dan HAM
		b Penguatan Modal BUMDesa	Drafting Kepturdes tentang pemberian tambahan modal BUMDesa	Kepturdes tentang pemberian tambahan modal BUMDesa	Ekbang - Carik
PRIORITAS PROGRAM : 7. PERDAGANGAN DAN PASAR TRADISIONAL					
PROGRAM KERJA : 4. PENATAAN KAWASAN LAPANGAN PATMASURI					
6	4 Perencanaan Penataan Kawasan Lapangan Patmasuri	a Perencanaan Penataan Lapangan Patmasuri	Studi awal perencanaan penataan kawasan lapangan patmasuri	Dokumen perencanaan awal	Ekbang - Pandu - PSD
		b Sosialisasi dan Disseminasi	Uji publik rencana penataan kawasan lapangan patmasuri	Dokumen hasil evaluasi uji publik, drafting dokumen yang telah disesuaikan	Ekbang - Pandu - PSD
		c Penyusunan dokumen perencanaan penataan lapangan patmasuri	Drafting dokumen akhir	Dokumen akhir	Ekbang - Pandu - PSD
PRIORITAS PROGRAM : 7. PERDAGANGAN DAN PASAR TRADISIONAL					
PROGRAM KERJA : 5. FASILITASI PAMERAN PERDAGANGAN					
6	5 Fasilitasi pameran perdagangan	a Bantul Expo	Pembuatan konsep, setting dan display stand, penunjukkan peserta pameran	Desain dan konsep stand, pengiriman peserta pameran	Ekbang
				43	

NO	DAFTAR KEGIATAN INDIKATIF	USULAN			TIM PENGELOLA KEGIATAN	REKOMENDASI
		BENTUK KEGIATAN	CAKUPAN KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN		
	b Pameran Perdagangan Lainnya	Updating info kegiatan pameran perdagangan	Data agenda pameran perdagangan	Ekbang		

PRIORITAS PROGRAM : 8. LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA

PROGRAM KERJA : 1. REVITALISASI KELEMBAGAAN PENANGANAN KEBENCANAAN DAN KEGAWATDARURATAN (TAGANA)

8	1 Revitalisasi kelembagaan penanganan kebencanaan dan kegawat daruratan (TAGANA)	1 Pemetaan potensi dan masalah, koordinasi dengan TAGANA lama, revitalisasi kelembagaan	Data peta potensi dan masalah organisasi TAGANA, Keplurdes pengukuhan pengurus TAGANA	Ekbang - KTCA	
	2 Bantuan operasional kelembagaan tanggap bencana	Penghitungan biaya operasional, drafting Keplurdes tentang pengukuhan pengurus TAGANA	Bantuan operasional untuk TAGANA	Ekbang - KTCA	

PRIORITAS PROGRAM : 8. LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA

PROGRAM KERJA : 2. Penguatan Kapasitas Usaha Ekonomi Produktif Berbasis Lingkungan

8	2 Penguatan kapasitas UEP berbasis lingkungan	Pemetaan potensi dan masalah, perencanaan penguatan kelembagaan, penghitungan besaran bantuan sosial	Data potensi dan masalah bank sampah, kegiatan penguatan kelembagaan, pemberian bantuan sosial	Ekbang - BUMDesa	
---	---	--	--	------------------	--

PRIORITAS PROGRAM : 9. INFRASTRUKTUR PENATAAN RUANG DAN PEMUKIMAN

PROGRAM KERJA : 1. PENGELOLAAN LAPANGAN DAN MAKAM DESA

10	1 Pengelolaan Lapangan dan Makam Desa	1 Pendirian Lembaga Pengelola Makam dan Lapangan desa	Koordinasi dengan pokgiat setempat, bersama dengan carik mendrafting reperdes dan aturan pelaksanaannya	Raperdes dan aturan pelaksanaannya	Ekbang - LPMD - Pandu
	2 Fasilitas Operasional Pengelola Makam dan Lapangan Desa	Penghitungan besaran biaya operasional	Pemberian bantuan sosial untuk operasional kelembagaan	Pemberian bantuan sosial untuk operasional kelembagaan	Ekbang - LPMD - Pandu

NO	DAFTAR KEGIATAN INDIKATIF	USULAN			TIM PENGELOLA KEGIATAN	REKOMENDASI	
		BENTUK KEGIATAN	CAKUPAN KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN			
PRIORITAS PROGRAM : 9. INFRASTRUKTUR PENATAAN RUANG DAN PEMUKIMAN PROGRAM KERJA : 2. PERENCANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN TERTINGGAL							
10	2	Pengembangan Kawasan Tertinggal	1 Pemetaan data dan potensi kawasan yg terindikasi tertinggi, verifikasi dan klarifikasi dengan stakeholder (<i>spacial planning methods</i>) 2 Penyusunan dokumen perencanaan awal 3 Sosialisasi dan desiminasi 4 Penyusunan dokumen akhir	Studi awal pemetaan kawasan tertinggal Penyusunan dokumen awal Uji publik rencana penataan kawasan Drafting dokumen akhir	Dokumen peta data dan poelensi kawasan terindikasi tertinggal Dokumen perencanaan awal Dokumen hasil evaluasi uji publik, drafting dokumen yang telah disesuaikan Dokumen akhir	Ekbang - Pandu - PSD Ekbang - Pandu - PSD Ekbang - Pandu - PSD Ekbang - Pandu - PSD	
PRIORITAS PROGRAM : 9. INFRASTRUKTUR PENATAAN RUANG DAN PEMUKIMAN PROGRAM KERJA : 3. PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN PENDIRIAN RUMAH SEWA SEHAT SEDERHANA							
10	3	Studi kelayakan Pendirian Rumah Sewa Sehat Sederhana	1 Penyusunan studi kelayakan pendirian rumah sewa sehat sederhana	Pemetaan data dan potensi, drafting studi kelayakan	Dokumen studi kelayakan	Ekbang - LPMD - Pandu - PSD	

NO	DAFTAR KEGIATAN INDIKATIF	USULAN			TIM PENGELOLA KEGIATAN	REKOMENDASI
		BENTUK KEGIATAN	CAKUPAN KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN		
PRIORITAS PROGRAM : 9. INFRASTRUKTUR PENATAAN RUANG DAN PEMUKIMAN PROGRAM KERJA : 4. REHABILITASI DAN PERAWATAN INFRASTRUKTUR DESA						
10 4 Rehabilitasi dan Perawatan Infrastruktur Desa						
	a	Perawatan JITU/JIDES - Rehabilitasi jaringan irigasi tersier - Angkat Walet	Pemetaan data dan potensi JITU/JIDES, Analisa kebutuhan peningkatan jaringan irigasi tersier	Dokumen peta masalah dan potensi, analisa kebutuhan peningkatan kualitas jaringan irigasi 3rd	Ekbang - Gapoktan -LPMD	
	b	Peningkatan prasarana pertanian - Pertanian - Perikanan - Peternakan	Pemetaan data dan potensi prasarana pertanian, Analisa kebutuhan peningkatan prasarana pertanian	Dokumen peta masalah dan potensi, analisa kebutuhan peningkatan prasarana pertanian	Ekbang - Gapoktan -LPMD	
PRIORITAS PROGRAM : 9. INFRASTRUKTUR, PENATAAN RUANG DAN PEMUKIMAN PROGRAM KERJA : 1. BANTUAN HIBAH INFRASTRUKTUR						
	1	Jalan Pengerasan, rehab jalan dan gang pedukuhan				
	2	Saluran Air Hujan Rehab/Pembuatan, Peningkatan Drainase				
	3	PJU dan Rambu Jalan a Pengadaan, rehab/Peningkatan PJU b Pengadaan cermin cembung				
					46	

NO	DAFTAR KEGIATAN INDIKATIF	USULAN			TIM PENGELOLA KEGIATAN	REKOMENDASI
		BENTUK KEGIATAN	CAKUPAN KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN		
4	Prasarana keamanan lingkungan, dan fasilitas umum lainnya a Pembuatan/ Rehab Gardu Ronda b Pembuatan/ Rehab Balai Pertemuan Warga c Pembuatan/ Rehab Gudang Perkakas d Pembuatan/ Rehab Gapura/Tugu e Pembuatan/ Rehab Papan Koran f Pembuatan WC Umum, Taman g Pembuatan Peta Wilayah, Papan Nama dan Penomoran Rumah h Pembuatan Pagar Bumi dan Pagar Makam					
PRIORITAS PROGRAM : 10. PENGEMBANGAN IPTEK PROGRAM KERJA : 1. INVENTARISASI PELAKU DAN PENGEMBANG TEKNOLOGI TEPAT GUNA						
11	Inventarisasi pelaku dan pengembang TTG					47

NO	DAFTAR KEGIATAN INDIKATIF	USULAN			TIM PENGELOLA KEGIATAN	REKOMENDASI
		BENTUK KEGIATAN	CAKUPAN KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN		
PRIORITAS PROGRAM : 11. LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA PROGRAM KERJA : 1. LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA						
9	1 Pembuatan sarana penunjang mitigasi bencana	Pembuatan Sumur Resapan/ Bio Pori				
	2 Pengadaan bibit tanaman konservasi					
	3 Pengadaan sapras penanganan dan pengelolaan sampah dan limbah	1 Sampah Pengadaan Tong/Bak Sampah 2 Limbah Rumah Tangga Rehab/Pembuatan SAL				

BAB V

KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Kebijakan pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan dengan menekankan pada prinsip *money follow function*.

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun pembelanjaan.

Lurah Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Tehnis Pengelolaan Keuangan Desa) yang terdiri atas:

- a. Carik / Sekretaris Desa
- b. Kepala Seksi
- c. Kepala Urusan Program
- d. Bendahara

Carik bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada Lurah Desa. Kepala Seksi dan Kepala Urusan Program bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penunjukan PTPKD dengan ditetapkannya Surat Keputusan Lurah Nomor 01 Tahun 2015. Bendahara Desa terdiri dari :

- a. Bendahara Penerimaan
- b. Bendahara Pengeluaran

dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Lurah Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Saudara Sumini, SPd Staf Pemerintah Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon kabupaten Bantul sebagai Bendahara Penerimaan Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 dan Surat Keputusan Lurah Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Saudara Minarsih SPd Staf Pemerintah Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon kabupaten Bantul sebagai Bendahara Pengeluaran Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015. Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat perubahan dalam pengelolaan keuangan desa.

Inti perubahan yang akan dilakukan antara lain mempertajam esensi pengelolaan keuangan desa dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan desa yang menyangkut penjabaran hak dan kewajiban desa dalam mengelola keuangan publik, meliputi mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan serta pertanggungjawaban keuangan desa.

Dalam pengelolaan keuangan desa Desa Panggungharjo dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakuknya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- l. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri C Nomor 01);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan se- Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 16);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 16);
- p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 24);
- q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 29);

- r. Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 30);
- s. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 33);
- t. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34);
- u. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2015 ((Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 35);
- v. Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 36).

➤ Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

Sumber pendapatan desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Pendapatan Transfer (Dana Desa, bagian hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten, Alokasi Dana Desa, bantuan keuangan dari pemerintah pusat/propinsi/kabupaten serta Pendapatan (Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat & lain-lain pendapatan desa yang sah).

Pengelolaan pendapatan desa bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan desa untuk meningkatkan kapasitas fiskal desa dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan publik masih banyak bergantung pada bantuan dari Pemerintah. Pendapatan Asli Desa (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang potensial untuk ditingkatkan.

Beberapa strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan desa adalah sebagai berikut :

- a. Optimalisasi penyerapan penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi baik dari Kabupaten maupun propinsi
- b. Mengoptimalkan hasil dari Sewa Gedung pertemuan dan gedung olah raga
- c. Meningkatkan kontribusi dari sewa lapangan
- d. Meningkatkan kontribusi dari sewa Tanah Kas Desa
- e. Mengoptimalkan Bagi Hasil dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Salah satu tolok ukur dari perkembangan ekonomi desa adalah besarnya pendapatan desa pada pos Pendapatan Asli Desa. Besarnya Pendapatan Asli Desa secara umum menunjukkan kemajuan aktivitas perekonomian pada masyarakat.

Untuk menertibkan administrasi keuangan desa maka setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti tersebut harus mendapat pengesahan oleh salah satu Koordinator PTPKD atas kebenaran materia yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Untuk pencairan dana APBDesa harus mendapat pengesahan oleh Carik yang selanjutnya dimintakan persetujuan kepada Lurah Desa

Pada tahun 2015 Pemerintah Desa Panggungharjo merencanakan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) sebagai berikut :

➤ Rencana Belanja Desa untuk melaksanakan kegiatan dalam Tahun Anggaran 2015 adalah sejumlah Rp 3.212.624.087,- (Tiga milyar dua ratus dua belas juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	: Rp 1.302.758.500,-
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	: Rp 340.927.600,-
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp 374.889.665,-
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp 1.182.282.700,-
5. Belanja Tidak Terduga	: Rp <u>11.640.000,-</u>
Jumlah Belanja	: Rp 3.205.124.087,-

➤ Rencana besarnya pendapatan untuk membiayai belanja desa pada tahun 2015 berdasarkan jenis pendapatan adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Desa	: Rp 775.459.000,-
2. Pendapatan Dana Transfer	: Rp 2.423.347.087,-
4. Pendapatan lain-lain	: Rp 13.818.000,-

JUMLAH KESELURUHAN

: Rp 3.212.624.087,-

SALINAN

BAB V
PENUTUP

- A. Program Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2015 Desa Panggungharjo ditinjau dari :
1. Pendanaan dititikberatkan dari APBN, APBD, APBDes dan Swadaya Masyarakat.
 2. Volume kegiatan, maka dititikberatkan program kerja adalah Pembangunan Fisik.
- A. Bantuan dari Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten sangat di harapkan demi terlaksananya Program Kerja Tahunan Desa Panggungharjo, baik berupa fisik maupun pendanaan.

Panggungharjo, 5 April 2015
LURAH,



WAHYUDI ANGGORO HADI



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KECAMATAN SEWON
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PANGGUNGHARJO**

Sekretariat: Kantor BPD Desa Panggungharjo Jl. KH. Ali Ma'sum Telp. 377863

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Senin, tanggal lima, bulan April, tahun dua ribu limabelas yang bertanada tangan dibawah ini :

1. Nama : Sukirman SH

Jabatan : Ketua BPD Desa Panggungharjo.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Panggungharjo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : Wahyudi Anggoro Hadi S.Farm. Apt

Jabatan : Lurah Desa Panggungharjo

Dalam hal bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Panggungharjo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyetujui Rancangan Peraturan Desa Panggungharjo tentang :

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA TAHUN ANGGARAN 2015

Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa

Demikian Kesepakatan bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA
DESA PANGGUNGHARJO



PIHAK KESATU
KETUA BPD PANGGUNGHARJO



Sukirman SH